



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

Kamis, 23 September 2021

Edisi: 00226448/GBPIX/2021

KLIPING

Berita Pertanian



BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Jl. Harsono RM. No 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Telp. (021) 7806 131 Ext. 2303, 2308, Email : humas-ip@pertanian.go.id
Website : www.pertanian.go.id

GUNTINGAN BERITA DAN PENDAPAT MENGENAI PERTANIAN

KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021

I. BERITA-BERITA MENGENAI PERTANIAN :

1. TANAMAN PANGAN :
 - Kementan Tegaskan Jagung Tersedia (R)..... 1-2
 - Opsi Impor Dikubur (BI)..... 3-4
2. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN :
 - Kalau Stok Banyak Tak Mungkin Naik (RM)..... 5
 - Jagung Bantuan Presiden pun Dibagikan ke para Peternak (MI)..... 6
 - Stok Jagung Pakan Memantik Polemik (KN)..... 7
 - Bansos & Medsos Pengaruhi Harga (BI)..... 8-9
3. PERKEBUNAN :
 - Tingkatkan Capaian Sertifikasi Sawit Berkelanjutan (K)..... 10
 - Kelapa Sawit Harus Jadi Bagian dari Aset Nasional (SI)..... 11
 - Gapki Dorong 100% Anggota Bersertifikat ISPO (ID)..... 12
 - Fokus Kembangkan Penghiliran CPO (BI)..... 18-19
4. LITBANG PERTANIAN :
 - Morowali Utara Rangkul IPB Kuatkan Pertanian (MI)..... 13
5. KETAHANAN PANGAN :
 - Bulog Serap 1 Juta Ton Beras Petani (ID)..... 14
6. PERTANIAN UMUM :
 - Sektor Pertanian Bantalan Ekonomi di Saat Pandemi (ID)..... 15
 - Asyik... Holding Pangan Tinggal Selangkah Lagi (RM)..... 16-17

00000000 O 00000000

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☒ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Kementan Tegaskan Jagung Tersedia

Pataka menyarankan pengelolaan data jagung diserahkan ke BPS.

■ DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan data stok jagung sebanyak 2,3 juta ton merupakan data valid. Hal itu ditegaskan seiring adanya keraguan terhadap data jagung saat ini.

Direktur Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Ismail Wahab menjelaskan, pihaknya melakukan pembaruan data stok jagung secara rutin setiap pekan dan ditangani langsung oleh dua unit, yakni Badan Ketahanan Pangan (BKP) serta Pusat Data dan Informasi Pertanian.

BKP melakukan survei periodik stok jagung di pengepul, gudang Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT), dan pasar. Sedangkan Pusdatin secara langsung mendata melalui mantri tani dan harmonisasi data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kementan siap menunjukkan lokasi gudang dan sentra yang saat ini memiliki stok jagung bila ada pihak lain yang ingin segera membantu distribusi jagung," kata Ismail saat dikonfirmasi, Rabu (22/9).

Ia menegaskan, masalah saat ini bukan produksi melainkan dis-

tribusi jagung ke peternak terhambat. Ismail mengakui ada kecenderungan pabrik pakan besar dan pengepul untuk menyimpan jagung dalam jumlah besar. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan suplai jagung untuk produksi pakan dan antisipasi kondisi harga jagung global yang juga sedang tinggi.

"Harga jagung di petani masih tinggi, karena pabrik juga masih berani membeli tinggi. Sementara harga pasar dunia naik 30 persen. Saya kira regulator harga jagung harus melakukan intervensi aktif," katanya.

Selain itu, ia meyakini dalam waktu dekat pasokan jagung akan bertambah seiring memasuki masa panen. Dia mengatakan, pada September hingga Oktober merupakan masa panen jagung yang ditanam di lahan sawah.

Salah satu wilayah dengan produksi besar, yakni Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang siap menyuplai kebutuhan jagung pakan ternak. Kepala Dinas Pertanian Grobogan Sunanto menegaskan, wilayahnya siap menyuplai kebutuhan jagung bagi peternak ayam. Menurutnya, pada September dan Oktober ini produksi jagung di

Kabupaten Grobogan dapat mencapai 170 ribu ton.

"September ini luas panen ada 26 ribu hektare dengan produksi 170 ribu ton. Kalau dikonversi dengan kadar air 15-17 persen maka masih ada 120 ribu ton," katanya.

Sunanto menambahkan, pada Oktober nanti, luas panen mencapai 11 ribu hektare dengan produksi jagung sebesar 70 ribu ton. Apabila dikonversi dengan kadar air 15-17 persen maka akan tersedia jagung sebanyak 50 ribu ton.

Ia tak memungkiri petani jagung pada musim tanam kali ini menikmati hasil panen yang baik terutama soal harga. Menurut dia, harga yang baik di tingkat petani juga akan membantu pemulihan ekonomi nasional.

Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) menyarankan agar pengelolaan data jagung dilakukan dan diterbitkan langsung oleh BPS. Hal itu selayaknya data perberasan yang saat ini dikelola langsung oleh BPS sehingga tidak ada klaim sepihak.

"Persoalan data harus segera diakhiri dan mencapai kesepakatan bahwa data jagung ke depan harus dikelola oleh BPS. Ego sektoral harus dibuang jauh-jauh," kata Ketua Pataka Ali Usman.

Menurut dia, baik petani maupun peternak adalah bagian penggerak ekonomi negara. Sehingga, tidak semestinya keduanya saling

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☒ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/10/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

menekan harga.

"Inilah momentum harmonisasi para pemangku kepentingan baik petani, peternak, pelaku usaha jagung, distributor jagung, dan industri pakan," katanya.

Pataka juga masih mempertanyakan data jagung sebesar 2,3 juta ton saat ini. Menurut dia, data jagung yang besar tidak selaras dengan melambungnya harga jagung yang mencapai Rp 6.000 per kg dari harga acuan Rp 4.500 per kg.

"Kalau memang surplus seharusnya harga jagung lebih murah, bukan sebaliknya," kata Ali.

Sementara itu, untuk mendukung kebutuhan industri pakan ternak, PT Berdikari (persero) mendatangkan gandum impor sebanyak 25 ribu ton. Importasi tersebut merupakan tahap ketiga dari total alokasi impor gandum Berdikari tahun ini sebanyak 300 ribu ton.

Direktur Utama Berdikari, Harry Warganegara, menjelaskan, gandum yang diimpor khusus untuk klasifikasi pakan ternak sehingga berbeda dengan gandum untuk bahan baku konsumsi pangan masyarakat.

"Gandum didatangkan adalah amanat pemerintah dalam upaya bersama menstabilkan harga pakan ternak sehingga Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) dapat menjaga kestabilan harga pakan," kata Harry.

■ ed: ahmad fikri noor

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☒ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL | 23/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN | 3 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI | ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | | ☐ Pojok/Karikatur |

| PROBLEM PASOKAN BAHAN BAKU PAKAN |

OPSI IMPOR DIKUBUR

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah memastikan untuk tidak membuka keran impor jagung bagi pakan ternak guna menciptakan stabilisasi harga komoditas itu di kalangan peternak yang belakangan ini mengeluhkan masalah lonjakan harga.

lim Fathimah Timorria, Nyoman Ary Wahyudi & Hendra Wibawa
redaksi@bisnis.com

Keputusan itu diambil setelah rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Kementerian Perencanaan pada Rabu (22/9). Saat rapat itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan bahwa Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi telah memastikan ketersediaan jagung untuk pakan dalam negeri relatif aman.

"Tidak jadi [impor]. Tadi sudah kita rapat. Ini mau dicari dari lokal sekarang. Dirjen Tanaman Pangannya sudah menjamin ada. Sekarang sedang diatur Bulog yang akan menjadi perantaranya," kata Lutfi saat ditemui *Bisnis* di kantor Kemendag, Rabu (22/9).

Menurut dia, Kementerian Pertanian bakal menyiapkan 30.000 ton jagung untuk pakan kepada peternak dan nantinya bakal sampai ke petani dengan harga Rp4.500. "Subsidi akan datang dari Kemendag melalui Bulog."

Dalam kaitan itu, kalangan peternak unggas mengata-

kan pemerintah harus siap menghadapi konsekuensi dari keputusan untuk tidak mengimpor jagung pakan, di tengah gejolak harga yang masih berlangsung dan disinyalir terjadi akibat pasokan yang terbatas. ^{31.3}

"Jika pemerintah memutuskan tidak impor, artinya harus bisa menanggung konsekuensi jika kondisi di lapangan tidak sesuai perkiraan. Bagaimana peternak tetap memperoleh jagung dengan mudah dan harga sesuai," kata Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional Sugeng Wahyudi, Rabu (22/9).

Dia mengkhawatirkan kondisi pasokan di lapangan justru tidak sesuai dengan data pemerintah. Jika pasokan memadai, harga jagung seharusnya tetap terkendali.

"Jika stok ada sesuai laporan pemerintah, seharusnya kondisi harga tidak seperti sekarang. Kalau demikian artinya ada yang tidak beres atau ada penimbunan."

Dalam audiensi dengan Presiden Joko Widodo, peternak

sejatinnya telah menyuarakan kepada pemerintah untuk mengamankan stok sebesar 500.000 ton, yang di antaranya dipasok melalui impor. Namun, Kementerian Pertanian menyebutkan terdapat stok sebesar 2,61 juta ton.

Terpisah, Sekretaris Perusahaan Umum (Perum) Bulog Awaluddin Iqbal membenarkan bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor jagung pakan. Guna mengatasi kondisi harga jagung pakan, penyerapan produksi lokal dioptimalkan.

"Prioritas sekarang mengoptimasi hasil petani dulu. Targetnya adalah memenuhi kebutuhan peternak dengan harga acuan pemerintah," katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Peternak Layan Nasional Musbar Mesdi menyebutkan kebutuhan jagung pakan untuk peternak mandiri mencapai 180.000 ton per bulan dan bagi peternak dalam gabungan koperasi berkisar 28.000 ton per bulan.

Selain berhadapan dengan harga pakan yang tinggi, pe-

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☒ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 5/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

ternak layer kini juga kesulitan menjual telur akibat lemahnya serapan pasar. Harga jual telur bahkan menyentuh Rp14.000 per kilogram di tingkat peternak, jauh dari acuan yang ditetapkan Rp19.000—Rp21.000 per kilogram.

Sementara itu, Kementerian Pertanian memastikan stok jagung sebesar 2,3 juta ton yang diumumkan sebelumnya tersedia di lapangan.

Direktur Serelia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Mohammad Ismail Wahab mengemukakan pihaknya melakukan pembaruan data stok jagung secara rutin setiap pekan yang didukung dua unit kerja yang secara

aktif memantau, yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Data dan Informasi Pertanian.

"Badan Ketahanan Pangan melakukan survei periodik stok jagung di pengepul, gudang GPMT, dan pasar. Sedangkan Pusdatin kami secara langsung melalui mantri tani dan harmonisasi data BPS. Datanya sama."

Bahkan Ismail siap menunjukkan lokasi gudang dan sentra yang saat ini memiliki stok jagung distribusi diperlukan segera. "Masalahnya saat ini bukan produksi tetapi distribusi jagung ke peternak yang terhambat."

Menurut dia, ada kecenderungan pabrik pakan besar dan pengepul menyimpan jagung dalam jumlah besar, karena khawatir pasokan untuk produksi pakan terganggu. Di sisi lain, harga jagung pasar dunia juga sedang tinggi.

MISTERI HARGA JAGUNG

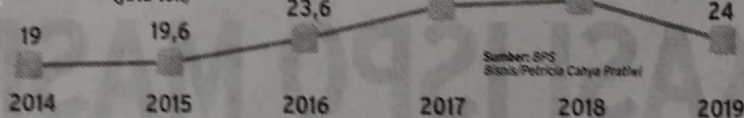


Persoalan harga pakan ternak berupa jagung yang melambung tinggi belum juga tuntas. Ketika pengusaha berharap sekali harga bisa segera kembali normal Rp4.500/kg, keinginan tersebut belum terwujud juga. Kondisi ini perlu dituntaskan secepatnya.

Realisasi Ekspor Impor Jagung (ribu ton)

Tahun	Impor	Ekspor
2019	1.017,0	2,41

Produksi Jagung Nasional (juta ton)



Harga jagung di petani masih tinggi, karena pabrik juga masih berani membeli tinggi. Sebaliknya, harga jagung di pasar dunia naik 30%. "Saya kira regulator harga jagung harus melakukan intervensi aktif. Kasihan peternak mandiri."

Sebelumnya, Muhammad Lutfi mengatakan risiko lonjakan harga jagung di dalam negeri telah diprediksi sejak awal tahun seiring dengan tren harga pangan dunia yang memperlihatkan tren kenaikan sejak akhir 2020 dan pasokan domestik yang memasuki masa paceklik.

Dia menambahkan risiko gejolak harga jagung pakan sejatinya telah disampaikan kepada Kementerian Koordi-

Ketersediaan Jagung Per Minggu II September 2021 (ton)	
Stok	Volume
Pengepul	744.250
Grosir	95.506
Agen	423.473
Distributor	29
Eceran	288.305
Industri Pengolahan	20.962
Usaha Lain	276.300
Pemerintah dan Lembaga Nirlaba	30.136
Rumah Tangga	14.214
Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)	722.252
Total Stok	2.615.427

Sumber: Kementerian Pertanian, diolah

nator Bidang Perekonomian melalui surat yang dikirim pada Maret 2021. "Tidak bisa sembarangan orang impor [jagung] karena memerlukan persetujuan dari Kementerian Pertanian," ujar Lutfi.

Meski terdapat stok jagung yang saat ini dipegang oleh sejumlah pelaku usaha, Ketua Dewan Jagung Nasional Tony J. Kristianto mengatakan hal ini tak lantas menyelesaikan masalah akses pakan oleh peternak, karena pemegang stok cenderung menahannya sebagai antisipasi menghadapi masa paceklik.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 23/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 7 /
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☒ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

Harga Pakan Jagung Tinggi Kalau Stok Banyak Tak Mungkin Naik

KOMISI VI DPR menyoroji jeritan peternak atas anomali harga telur yang anjlok di saat harga pakan jagung naik. Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta membuat terobosan mengatasi jeritan peternak ini.

Anggota Komisi VI DPR Mufti Aimah Nurul Anam mengaku mendapat banyak keluhan dari para peternak kecil di daerah. Peternak telur ini gelisah ketika harga pakan jagung naik di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2021 yakni Rp 4.500 per kilogram. *RM 7*

"Artinya, memang di lapangan harganya tidak terkontrol dengan baik. Kami melihat Kemendag memang belum optimal mengelola perdagangan jagung ini," protes Mufti dalam rapat kerja Komisi VI bersama Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Mufti mewanti-wanti Kemendag tidak gegabah dengan mengeluarkan kebijakan impor-tase jagung untuk mengatasi

keluhan peternak.

Ditegaskannya, gejala harga komoditi seperti pakan jagung tidak selalu solusinya impor. Sebab, nyatanya saat ini, untuk jagung produksinya surplus.

Data dari Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan, ada surplus jagung lokal, stok hingga pekan kedua September ini sekitar 2,3 juta ton. Dengan surplus ini, harusnya Kemendag bisa mengatur persoalan harga jagung.

"Harapan kami, sudah ada mitigasi jempit bola kepada pelaku-pelaku penjual jagung untuk mengeluarkan stoknya sesuai Permendag Nomor 7 Tahun 2020," tambah dia.

Mendag M Lutfi justru meragukan data stok jagung tersebut. Menurutnya, jika ada stok jagung sebesar 2,3 juta ton, tidak mungkin harga di tingkat petani naik menjadi Rp 6.100 per kilogram.

"Kalau ada barangnya, sekarang kita jangan ngomong jutaan, ngomong 7 ribu saja nggak ada buat kebutuhan 1 bulan di Blitar. Nggak ada ba-

rangnya," tegas dia.

Lutfi memastikan telah mengecek ketersediaan jagung di pasaran bahkan sampai langsung ke pemain besar jagung. Namun, stok tersebut tidak ada. Mengenai sikap Kemendag yang dinilai terlambat mengatasi persoalan harga jagung ini, Lutfi menampikinya.

Dia menegaskan, pihaknya sudah menyampaikan peringatan melalui surat tertulis ke Menko Perekonomian awal tahun lalu, untuk berhati-hati terhadap ketersediaan sejumlah bahan pokok seperti jagung dan kedelai di bulan Maret 2021.

"Saya sudah tulis surat awal tahun, saya sudah prediksi bahwa harga jagung akan tinggi. Kenapa? Karena harga kedelai dan harga barang lain juga tinggi," katanya.

Soal surat ini, Mufti langsung potong pernyataan Lutfi. Menurutnya, dengan adanya peringatan soal potensi kenaikan di Maret 2021, harusnya sudah ada langkah antisipasi dari Kemendag. Bukan sekadar menulis surat ke institusi lain. ■ KAL

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Jagung Bantuan Presiden pun Dibagikan ke para Peternak

PETERNAK ayam petelur, Suroto, 49, semringah seusai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu pekan lalu. Kini ia sedikit tenang kendati belum bisa menyembunyikan kegelisahan atas persoalan perunggasan nasional yang membuat kebanyakan peternak ayam petelur mumet (pusing).

Penyebabnya, harga pakan melonjak. Harga telur pun jeblok. Usaha peternakan 4 ribu ekor ayam milik Suroto diambang kolaps, modal dari jual mobil seharga Rp115 juta tak cukup, ditambah hutang Rp400 juta di BNI dan Rp50 juta belum lunas.

Bapak tiga anak itu kesulitan mengangsur kredit karena merugi Rp1,6 juta setiap hari untuk pakan. Itu belum termasuk pengeluaran lain.

"Ayam saya tinggal 4 ribu ekor semula 10 ribu ekor, merosot saat PPKM," ujar Suroto, Selasa (21/9).

Suroto tak sendiri. Kondisi serupa dirasakan sekitar 400-an peternak di Dusun Krajan, Desa Suruhwadang, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.

Faktor itulah yang mendorong tekadnya ingin menyampaikan langsung

permasalahannya ke Kepala Negara dengan membentangkan poster bertuliskan 'Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan

harga wajar/telur murah' saat Presiden melakukan kunjungan kerja ke Blitar, Jawa Timur.

"Alasan saya membentangkan poster karena satu-satunya orang di Indonesia yang bisa menolong peternakan rakyat hanya Presiden Jokowi," kata pendiri Paguyuban Peternak Rakyat Nasional di Blitar tersebut.

Apa yang dilakukan Suroto ternyata direspons oleh Jokowi. Ia pun diundang ke Istana. Kepala Negara merespons teriakan Suroto.

"Pak Jokowi tersenyum melihat saya dan masih mengingat lalu mengatakan, 'saya lihat tulisan kamu itu, oh, jagung'," kata Jokowi kepada

Suroto

Ia pun meminta maaf karena aksinya itu ternyata membuat repot sejumlah pihak.

Selang beberapa hari dari pertemuan di Istana, bantuan 20 ton jagung pipil kering dari Presiden pun sampai ke kandang ayam milik Suroto. Namun, ia tak ingin berbahagia sendirian. Jagung bantuan Sang Presiden dibagikan ke para peternak.

"Sebanyak 42 peternak yang populasi ayamnya 2 ribu ekor dapat 2-3 sak, per saknya berisi 80 kg. Sebanyak 51 peternak kecil di lingkungan sekitar rumah juga saya kasih," ujarnya.

Suraji, peternak 500 ekor ayam di Desa Suruhwadang, berterima kasih ke Jokowi atas bantuan jagung. "Kulo (saya) terima kasih ke Pak Jokowi dan Pak Suroto," katanya. (Bagus Suryo/X-7) **M1. 2**

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

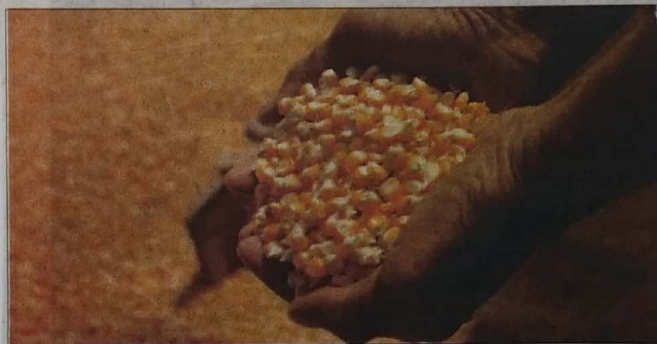
☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 23/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 4/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☒ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

■ JAGUNG

Stok Jagung Pakan Memantik Polemik



ANTARA/Okky Lukmansyah

Hingga pekan ketiga bulan September 2021 ini, harga pakan jagung berkisar Rp 6.100 per kilogram (kg).

JAKARTA. Selain meratapi harga telurnya anjlok di pasaran, peternak ayam layer juga harus menghadapi kenyataan bahwa harga pakan jagung melonjak drastis sejak awal bulan ini. Hingga pekan ketiga September 2021 ini, harga pakan jagung berkisar Rp 6.100 per kilogram (kg). Padahal, idealnya harga pakan jagung di peternak adalah Rp 4.000 - Rp 4.500 per kg.

Ketua Umum Asosiasi Peternak Layer Nasional, Musbar Mesdi menyatakan, lonjakan harga pakan jagung ini lantaran ketersediaan jagung untuk pakan memang sedikit.

Untuk itu, dia meminta pemerintah memperbaiki neraca komoditas jagung. Hal ini agar kebutuhan pasokan dan permintaan dapat terpantau dengan tepat.

"Harga pakan jagung untuk ternak bisa diantisipasi jika saja pemerintah memiliki data pasokan dan kebutuhan jagung setiap bulannya," ujar dia, Rabu (22/9).

Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi mengatakan, stok jagung nasional mencapai 2,3 juta ton hingga pekan kedua September 2021.

Namun kenyataannya harga pakan jagung untuk peternak melambung hingga Rp 6.500 - Rp 7.000 per kilogram.

Menanggapi klaim tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, jika stok jagung nasional sebanyak 2,3 juta ton memang benar, maka seharusnya tidak ada kenaikan harga pakan jagung untuk peternak yang terjadi saat ini. "Bahkan bila ada

stoknya, kami siap subsidi selisih harganya agar bisa dijual Rp 4.500 per kg," kata dia.

Vendy Yhulia Susanto

Data Ketersediaan Jagung di Indonesia (Per 20 September 2020)

Keberadaan Stok Jagung	Jumlah (Ton)
Pengepul	744.250
Grosir	95.506
Agen	423.473
Distributor	29
Eceran	288.305
Industri Pengolahan	20.962
Usaha Lain	276.200
Pemerintah dan Lembaga Nirlaba	30.136
Rumah Tangga	14.216
Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT)	722.252
Total	2.339.127

Sumber: Kementan dan Riset KONTAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | | | ☐ Pojok/Karikatur |

PROBLEMATIKA PETERNAK AYAM PETELUR

BANSOS & MEDSOS PENGARUHI HARGA

Peni Widarti & Akhirul Anwar
redaksi@bisnis.com

Bisnis, SURABAYA — Anomali rendahnya harga telur ayam di tengah kenaikan harga pakan jagung bukan persoalan baru bagi peternak ayam di Jawa Timur. Faktor bantuan sosial yang tidak kunjung cair serta munculnya acuan harga di media sosial menambah persoalan bagi peternak.

Kenaikan harga jagung yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga telur membuat peternak merugi hingga Rp6.000—Rp7.000/kg. Kondisi seperti itu sebenarnya sudah terjadi selama 11 bulan terakhir.

Ketua Asosiasi Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Blitar Rofi Yasifun mengatakan

“

Ada share harga di media sosial oleh oknum yang ikut memperkeruh harga dan selalu ditekan oleh para pedagang.

harga telur saat ini jauh di bawah acuan Permendag No.7 Tahun 2020. Harga telur on farm atau di tingkat peternak Blitar sekitar

Rp13.000—Rp14.000/kg.

“Sementara harga jagung untuk pakan saat ini di Blitar Rp5.800—Rp6.200/kg atau secara rata-rata di Jatim mencapai Rp7.000/kg. Sedangkan pakan yang diberikan untuk ayam ini sebesar 50% pakai jagung,” ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (22/9).

Menurut Rofi, seharusnya harga patokan peternak (HPP) telur yakni Rp22.750—Rp23.750/kg, namun yang terjadi harganya masih sangat rendah yakni Rp13.000—Rp14.000/kg.

Sementara itu, dikutip dari data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jatim per 22 September 2021 tercatat harga telur di pasar saat ini rata-rata Rp18.155/kg, harga tertinggi di Gresik Rp20.000/kg, dan harga terendah di Nganjuk, Kediri dan Bondowoso Rp17.000/kg. Harga telur ayam tersebut terus mengalami

penurunan dibandingkan

dengan Agustus yang rerata Rp23.000/kg.

Rofi menambahkan bahwa stok telur di peternak selalu habis setiap hari, namun tidak berhasil mengerek harga di pasar. Dia memperkirakan hal ini salah satunya dipicu oleh kondisi pasar yang belum membaik akibat dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.

“Telur kami setiap hari habis terjual, paling ada stok untuk 1 hari—3 hari saja. Analisis saya,

ada suplai yang lebih, atau demand yang turun karena imbas PPKM. Sementara daya tawar peternak itu lemah, karena sudah kehabisan finansial, mereka harus segera beli makan untuk besoknya,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Rofi, diperkirakan

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|--|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

bantuan sosial non tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) juga belum cair mulai akhir Juli lalu hingga saat ini. Bansos yang dirapel tersebut dinilai membuat *demand* pasar tidak stabil.

Di sisi lain, media sosial berperan memengaruhi harga di mana ada oknum yang memperkeruh harga sehingga merugikan peternak. Laman media sosial tersebut menginformasikan harga telur dengan acuan yang tidak pas.

"Ada *share* harga di media sosial oleh oknum yang ikut memperkeruh harga dan selalu ditekan oleh para pedagang. Seperti di Facebook banyak beredar info harga telur sangat murah setiap jam tujuh pagi, padahal harga telur terbentuk di jam 13.00—14.00."

Para peternak ayam petelur pun berharap agar ada intervensi pemerintah daerah maupun BUMN pangan di saat harga jagung mahal, misalnya seperti mengadakan operasi pasar agar stok telur dapat terserap pasar dengan optimal.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, Drajat Irawan mengatakan harga telur saat ini memang sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat yang turun akibat PPKM.

AFKIR DINI

Dalam perkembangan lain, peternak ayam petelur di wilayah Malang Jawa Timur terpaksa harus melakukan afkir dini untuk ayam petelur yang masih produktif karena harga telur ayam masih anjlok.

Pekerja di salah satu peternakan ayam petelur di Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Dani Uluf Suwanda mengatakan bahwa afkir dini terhadap 2.500 ekor ayam

harus dilakukan lantaran harga telur belum membaik.

"Kami terpaksa afkir dini 2.500 ekor ayam, meskipun ayam itu masih produktif. Namun kami tidak punya pilihan lain," ujar Dani dilansir dari *Antara*.

Dani menjelaskan, harga ayam pada saat dilakukan afkir dini, berada pada kisaran Rp12.000—Rp14.000/kg. Harga tersebut masih di bawah kondisi normal, yang sebelumnya berada pada angka Rp16.000/kg. ■



KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 8 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

TATA KELOLA PERKEBUNAN

Tingkatkan Capaian Sertifikasi Sawit Berkelanjutan

JAKARTA, KOMPAS — Sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan terus digenjut. Upaya percepatan terus dilakukan terutama untuk mendorong sertifikasi pada kelompok petani sawit. Kendala klasik terkait legalitas lahan perlu segera diselesaikan.

Setelah sepuluh tahun penerapan sertifikasi pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) berjalan di Indonesia, terdapat 755 sertifikat yang telah diterbitkan untuk perkebunan swasta dan PT Perkebunan Nusantara (PT-PN) dengan luas lahan 5,8 juta hektar dari total 9,6 juta hektar. Namun, sertifikat ISPO yang diterbitkan untuk kelompok petani, koperasi, dan badan usaha milik desa (BUM-Des) saat ini baru 20 sertifikat seluas 12,600 hektar. Jumlah

ini masih jauh dari total luas tutupan sawit di Indonesia yang menurut Kementerian Pertanian (2019) mencapai 16,381 juta hektar.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, berdasarkan indeks keberlanjutan, perkebunan kelapa sawit dari kelompok petani sudah masuk dalam kategori berkelanjutan pada aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Namun, pada aspek hukum dan tata kelola lahan masih masuk dalam kategori tidak berkelanjutan.

"Sebanyak 76,64 persen kebun sawit petani masuk dalam kawasan hutan," kata Gulat, Rabu (22/9/2021), di Jakarta.

Legalitas lahan menjadi syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi ISPO. Lahan yang akan diajukan untuk sertifikasi

tidak boleh berada di dalam kawasan hutan. Kondisi ini pula yang turut menghambat proses peremajaan sawit pada petani swadaya atau kebun rakyat.

Sekretariat ISPO

Ketua Umum Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan Achmad Mangga Barani menyatakan, percepatan sertifikasi ISPO mutlak diperlukan. Ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah, antara lain meningkatkan pemahaman, dan komitmen dari pelaku usaha perkebunan sawit.

"Kami pun mendorong agar sekretariat komite ISPO bisa segera dibentuk. Adanya tenaga pendamping pekebun juga perlu ditambah lagi," ujarnya.

Deputi II Bidang Pangan

dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah menyampaikan, pembentukan Sekretariat Komite ISPO akan dibentuk dalam waktu dekat. Pembentukan komite ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Selain itu, identifikasi pada kebun rakyat juga akan diupayakan agar sertifikasi ISPO bisa segera didapatkan. Penggunaan dana sarana dan prasarana pun bisa digunakan untuk memfasilitasi kelompok kebun rakyat.

"ISPO ini amat penting untuk menjaga eksistensi kelapa sawit yang kita miliki dari satu generasi ke generasi berikutnya," tutur Musdhalifah.

(TAN)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☒ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☒ Seputar Indonesia	TANGGAL 23/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 3/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

Kelapa Sawit Harus Jadi Bagian dari Aset Nasional

JAKARTA - Indonesia harus dapat memastikan kelapa sawit menjadi bagian dari aset nasional karena telah terbukti menjadi salah satu penopang utama perekonomian. Bahkan, komoditas sawit bisa membawa Indonesia menjadi penguasa perdagangan minyak nabati di pasar internasional.

Akademisi IPB Rachmat Pambudy mengatakan, perkebunan sawit adalah keunggulan komparatif Indonesia yang sebenarnya sudah berhasil menjadi keunggulan kompetitif. Perannya dalam pembangunan nasional sangat strategis.

"Agar sawit bisa bersaing di pasar global dengan minyak nabati lain, seluruh masyarakat harus kompetitif dan memastikan sawit menjadi bagian dari aset nasional. Jangan sampai nanti diklaim menjadi milik negara lain. Jadi, pastikan masyarakat harus ikut menjaga kelangsungan budi daya komoditas sawit Indonesia," kata Rachmat, di Jakarta, kemarin.

Rachmat mengatakan, setiap industri memiliki risiko terhadap lingkungan seperti pabrik tekstil dan jenis usaha lain. Namun, dengan memenuhi prinsip *sustainable development*,

risiko itu dapat dikurangi dan dampak positifnya lebih besar bagi masyarakat.

Pengawasan pemerintah dan konsumen, paparnya, telah membawa industri sawit terus melakukan perbaikan. Sejak tahun 2001, perusahaan kelapa sawit sudah didorong untuk menerapkan prinsip Millenium Development Goals (MDGs) yang dilanjutkan menjadi Sustainable Development Goals (SDGs).

Pelaku industri sawit juga telah diwajibkan mengikuti Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Ada kebutuhan kepastian dari konsumen internasional bahwa semua perusahaan harus memberikan perlindungan kepada lingkungan, penduduk, dan satwa liar. Perusahaan sawit nasional sudah berkomitmen dan terus berupaya memenuhi harapan konsumen ini," paparnya. *Sl.g*

Secara terpisah, Pendiri dan CEO Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) Teguh Patriawan mengatakan, sebagai perusahaan nasional yang bergerak di bisnis kelapa sawit, pihaknya terus

berupaya menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Langkah ini dilakukan bukan hanya karena tuntutan konsumen. Namun, kelangsungan dan masa depan perusahaan juga sangat ditentukan oleh kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keadilan yang diterima para tenaga kerja di perusahaan. Saat ini, NSS menyerap sekitar 2.700 orang karyawan.

Dia mengatakan, Nusantara Sawit Sejahtera sedang melakukan penanaman kebun sawit rakyat (plasma) disekitar kebun perusahaan. Plasma dilakukan dengan menggunakan bibit unggul dan merekomendasikan penggunaan pupuk berimbang, tidak berlebihan untuk konservasi tanah.

"NSS mengelola limbah pabrik sehingga bisa digunakan lagi ke tanaman untuk menjadi pupuk. Kami selalu coba menghemat dengan cara-cara yang betul dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Untuk masyarakat sekitar, NSS membangun plasma dan menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)," ujarnya.

herufebianto

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☒ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL	23/9/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN	7/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI	☒ Berita
☒ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya		☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan		☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post		☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika			☐ Pojok/Karikatur

Gapki Dorong 100% Anggota Bersertifikat ISPO

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendorong seluruh perusahaan anggota asosiasi tersebut dapat mengantongi sertifikat sawit lestari Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dalam waktu dekat ini. Saat ini, sudah 496 anggota Gapki yang mengantongi sertifikat tersebut. ISPO menjadi salah satu parameter industri hulu sawit di Indonesia dijalankan secara berkelanjutan.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, sertifikasi ISPO mengalami kemajuan dalam 10 tahun terakhir ini dan seluruh anggota Gapki terus didorong agar mengantongi sertifikat tersebut. "Kalau bicara 100% ISPO (di Gapki), ada faktor yang bisa diselesaikan di internal, ada juga faktor yang bisa didiskusikan dengan pemerintah. Gapki 100% ISPO, kita terus upayakan, tinggal masalah waktu saja," kata Joko dalam seminar daring bertajuk percepatan sawit Indonesia berkelanjutan, Rabu (22/9).

Menurut Joko, proses ser-

tifikasi ISPO menemui sejumlah kendala, mulai dari kondisi pandemi Covid-19 hingga transisi ke ISPO baru yang masih perlu pendalaman. Aspek kelembagaan juga mempengaruhi percepatan ISPO, pelaku usaha perlu komunikasi yang lebih dalam dengan Komite ISPO. Komite ISPO sebagai pelaksana harian harus aktif memberikan informasi terbaru mengenai ISPO, terutama sejak implementasi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka perlu penyesuaian tentang prosedur ISPO.

Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan Achmad Mangga Barani mengatakan, lahan sawit yang mendapatkan sertifikasi ISPO hingga Juni 2021 mencapai 5,80 juta hektare (ha). Sertifikat yang diterbitkan 760 yang dimiliki oleh 746 perusahaan, 10 koperasi swadaya, dan empat koperasi unit desa plasma. Pencapaian ISPO semakin baik, selama pandemi saja sudah diterbitkan 139 sertifikat. Luas sawit

yang ditargetkan mendapatkan ISPO adalah 16,38 juta ha, artinya baru 34% yang tersertifikasi.

Terbitnya sertifikasi ISPO dibagi berdasarkan tiga periode, pertama periode 2011-2015 berdasarkan Permentan No 19 Tahun 2011 dengan 127 sertifikat ISPO untuk perusahaan.

Periode 2016-2019, berdasarkan Permentan No 11 Tahun 2015 sebanyak 494 sertifikat dan periode 2016-2019 mengacu Permentan No 38 Tahun 2020 sebanyak 139 sertifikat.

Adanya percepatan implementasi sertifikat ISPO bagi para pekebun dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha perkebunan sekaligus mempercepat terbentuknya Sekretariat Komite ISPO.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, pihaknya menargetkan 5.200 ha lahan tersertifikasi ISPO sepanjang tahun ini, tapi hingga September baru terealisasi 1.456 ha. Rendahnya pencapaian ISPO karena

tumpang tindih perkebunan dengan kawasan hutan. Untuk memudahkan pekebun rakyat mendapatkan ISPO dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu *absolute sustainable* dan *relative sustainable*. Kategori pertama untuk korporasi dan kategori kedua untuk proses peremajaan sawit rakyat.

Moratorium Sawit

Sementara terkait Inpres No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau disebut Inpres Moratorium Sawit yang habis masa berlakunya pada 19 September ini, Gulat Manurung mengatakan, perlu segera diputuskan apakah akan dilanjutkan atau sebaliknya. "Untuk kebijakan moratorium sawit perlu dipertimbangkan lagi apakah dilanjutkan atau tidak. Jika tidak dilanjutkan maka bisa berdampak pada ekspor sawit dan harga sawit, semuanya menjadi keputusan pemerintah," jelas Gulat. (dho)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☒ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/01/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☒ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Morowali Utara Rangkul IPB Kuatkan Pertanian

SEJUMLAH daerah sukses memaksimalkan produk pertanian di wilayahnya, setelah bekerja sama dengan perguruan tinggi. Langkah serupa juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang merangkul Institut Pertanian Bogor.

"IPB akan melaksanakan kajian pemetaan potensi wilayah dan komoditas di Kabupaten Morowali Utara. Hasil kajian IPB akan menjadi pedoman dasar bagi kami untuk merancang kebijakan daerah, khususnya dalam pembangunan pertanian," ungkap Bupati Delis Julkarson Hehi, kemarin.

IPB lewat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat akan menganalisis secara komprehensif potensi Morowali Utara. Mulai aspek pertanian, peternakan, perikanan, hingga pengembangan bisnis yang potensial dan menguntungkan masyarakat. *M-S*

"Kami bertekad mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis sains di sektor pertanian," tambah Bupati yang juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sulawesi Tengah itu.

Rektor IPB Prof Arif Satria menyambut baik keinginan Pemkab Morowali Utara. "Kajian akan dilakoni secara serius oleh

tim peneliti IPB yang berasal dari lintas departemen agar mendukung kebijakan pemerintah daerah yang presisi," tandasnya.

Dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Guru Besar Ilmu Bioteknologi, Arifin Noor Sugiharto menyuarakan pentingnya regulasi dan perangkatnya, untuk mengatasi persoalan jagung. Posisi jagung cukup penting untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan ternak nasional.

"Persoalan jagung juga bisa diatasi dengan membangun silo di semua daerah, infrastruktur, mengatur tata niaga, dan yang terpenting membeli hasil panen petani. Perlu perangkat regulasi agar memberikan kepastian," tegasnya.

Arifin menjelaskan semestinya pemerintah membeli seluruh jagung hasil panen petani. Persis seperti Bulog menyerap beras. "Saat ini pemerintah sudah harus memikirkan pembangunan gudang jagung di semua daerah."

Di Sumatra Utara, pemerintah provinsi mendorong Kabupaten Simalungun menjadi lumbung pangan nasional. Pasalnya, daerah ini memiliki lahan yang luas dengan produktivitas pertanian yang baik.

"Kami telah berbicara dengan Pemkab Simalungun dan pejabatnya hingga ke tingkat desa. Kami mendukung daerah itu jadi lumbung pangan nasional," ujar Gubernur Edy Rahmayadi. (TB/BN/YP/LD/DW/DY/N-2)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☒ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Bulog Serap 1 Juta Ton Beras Petani

JAKARTA – Perum Bulog berhasil menyerap beras petani lokal sebanyak 1 juta ton per Rabu (22/9). Hal ini menunjukkan BUMN tersebut tetap konsisten melaksanakan salah tugasnya sesuai Inpres No 5 Tahun 2015 yakni mengamankan harga gabah/beras di tingkat petani dengan menyerap beras petani dalam negeri selama masa pandemi Covid-19.

Bulog melakukan pembelian beras petani dengan melibatkan kelompok tani/gapoktan, penggilingan, dan berbagai *stakeholder* lainnya. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, realisasi pengadaan beras dalam negeri per Rabu (22/9) mencapai 1.003.088

ton yang tersebar di semua wilayah kerja Bulog di seluruh Indonesia. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jaringan Bulog di seluruh Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Iqbal menuturkan, keberhasilan Bulog dalam melakukan penyerapan beras dalam negeri ini merupakan kerja keras Satuan Kerja Pengadaan (Satker ADA) Perum Bulog dan komitmen mitra kerja yang tidak henti-hentinya menyerap beras di tingkat petani. "Tercatat dari awal tahun 2021 hingga Rabu (22/9) beras dalam negeri sudah terserap sebanyak 177 ribu ton setara beras oleh Satker ADA dan penyerapan yang dilakukan oleh mitra kerja binaan

(koperasi dan nonkoperasi) sebanyak 826 ribu ton," ujar Iqbal dalam keterangannya, kemarin.

Penyerapan beras dalam negeri ini sangat membantu petani Indonesia yang kesulitan menjual beras mereka selama pandemi Covid-19 dan penyerapan ini juga berdampak pada stabilisasi harga di tingkat petani. "Selain untuk memupuk stok sebagai cadangan beras pemerintah, kegiatan penyerapan gabah/beras petani dalam negeri ini juga menggerakkan perekonomian di tingkat petani sehingga dapat memulihkan roda perekonomian sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi selama pandemi Covid-19 ini," jelas Iqbal. (dho) 10-7

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/6/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 7 / 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Sektor Pertanian Bantalan Ekonomi di Saat Pandemi

JAKARTA – Ekonom senior Indef Bustanul Arifin menyatakan bahwa sektor pertanian harus tetap dijaga pertumbuhannya, mengingat sektor tersebut merupakan bantalan atau sandaran ekonomi di tengah pandemi Covid-19. "Penting sekali untuk menjaga sektor pertanian tetap berproduksi. Hal itu karena ketika sektor lain terpuruk akibat pandemi justru sektor pertanianlah yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, sektor pertanian disebut sebagai bantalan bagi perekonomian nasional," kata Bustanul di Jakarta, kemarin.

Menurut Badan Pusat

Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) pertanian pada kuartal IV-2020 tumbuh 2,59% (*year-on-year/yoy*). Bustanul menjelaskan, Indonesia tidak akan mungkin menjadi negara terkuat di dunia jika sektor pertaniannya tidak dikelola dengan baik, selain untuk kebutuhan perut sehari-hari, sektor pertanian juga terbukti berhasil menciptakan lapangan pekerjaan. "Sektor pertanian itu harus benar-benar dijaga pertumbuhannya dan terus dilakukan inovasi agar sektor pertanian semakin berkembang," ungkap Bustanul.

Direktur Program Indef Eshter Sri Astuti mengatakan,

sektor pertanian Indonesia telah berdaya saing, kuncinya terletak pada pengelolaan pertanian. "Negara Eropa sudah banyak memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memajukan pertanian dan Indonesia bisa menerapkan secara perlahan meskipun belum sempurna," papar dia. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) terus mengalami perkembangan yang cukup baik sehingga nilai kesejahteraan petani tetap terjaga. Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2021 mencapai 103,48 atau naik 1,16% dari Juli 2020, sejak Juni 2020 NTP dan NTUP sudah jauh membaik.

Sedangkan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Perta-

nian Suwandi mengatakan, pihaknya tengah mendorong program kluster pangan lokal dan diversifikasi pangan melalui program pekarangan pangan lestari dan *food estate*. Kementerian Pertanian juga terus menjaga ketersediaan pangan dan memberikan stimulus berupa relaksasi kredit usaha rakyat (KUR) serta mempercepat bantuan sarana dan prasarana, membantu petani dalam mengangkut bantuan sarana dan prasarana produktivitas. "Kementerian Pertanian tetap fokus pada pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sektor pertanian yang berkelanjutan," jelas dia. (dho) 107

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 25/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 16 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Jokowi Teken PP Penggabungan 6 BUMN

Asyik... Holding Pangan Tinggal Selangkah Lagi

Presiden Jokowi telah menekan Peraturan Pemerintah (PP) penggabungan BUMN Pangan. Dengan demikian, pembentukan holding pangan tinggal selangkah lagi alias memasuki tahapan akhir.

DIREKTUR Utama PT RNI (Persero) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, penggabungan BUMN Pangan telah diteken Jokowi dengan menerbitkan tiga PP. Pertama, PP Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT Bhanda Ghara Rekta (Persero) atau BGR Logistics ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI.

PPI adalah BUMN yang bergerak di sektor perdagangan dan logistik. Penggabungan BGR Logistics ini didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penetrasi jaringan distribusi dan perdagangan. Serta, mendukung ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan.

Kedua, PP Nomor 98 Tahun

2021 tentang penggabungan PT Pertani (Persero) ke dalam PT Sang Hyang Seri (Persero) atau SHS. Merger dilakukan karena keduanya bergerak pada sektor Pertanian. Selain atas pertimbangan untuk efisiensi dan efektivitas, juga untuk mendukung ketersediaan benih dan bahan pangan.

Ketiga, PP Nomor 99 Tahun 2021 tentang penggabungan PT Perikanan Nusantara atau Perinus ke dalam PT Perikanan Indonesia. Penggabungan ini bermaksud untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, inklusivitas dan mutu perikanan.

"Sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir, penggabungan dari enam menjadi tiga BUMN Pangan ini, adalah tahap kedua yang harus dilaku-

kan sebagai proses persyaratan pembentukan Holding BUMN Pangan," jelas Arief dalam keterangan resminya kepada *Rakyat Merdeka*, Senin (20/9).

Ia menyatakan, PP Penggabungan BUMN Pangan ini nanti akan dilengkapi dengan persetujuan rancangan penggabungan dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) perubahan Anggaran Dasar. RM-10

"Satu tahap lagi yaitu PP Holding BUMN Pangan sebagai fase terakhir, adalah rangkaian pembentukan holding BUMN Pangan yang kami harapkan kuartal IV tahun ini rampung," ucapnya.

BUMN Klaster pangan merupakan gabungan dari 9 BUMN yang terdiri dari, RNI sebagai induk, diikuti PPI, BGR, SHS, Pertani, Perido, Perinus, Berdikari dan PT Garam.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda melihat,

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/9/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 10 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

penggabungan BUMN Pangan sebagai upaya yang bagus dari Pemerintah. Namun ia mengingatkan, eksekusinya bakal menantang ke depan.

"Karena bukan hanya menggabungkan dan membesarkan perusahaan negara di bidang yang sama, tapi juga membenahi sektor pangan itu sendiri," ujar Huda kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Maklum saja, papar Huda, koordinasi terkait pangan antar kementerian belum satu pintu. Sehingga Pemerintah membentuk BPN (Badan Pangan Nasional) yang diharapkan bisa menjadi *leader* di sektor ini.

"Masalah pangan itu ruwet. Holding Pangan yang akan terbentuk ini diharapkan bisa membenahi itu. Karena muncul kekhawatiran ada kepentingan sektoral," imbuh Huda.

Namun yang lebih penting, sambungnya, bagaimana Holding BUMN Pangan memiliki efek gan-

da ke masyarakat. Bahkan secara nasional. Sehingga kemandirian pangan benar-benar terwujud.

Menyoal kekhawatiran nasib para karyawan BUMN yang dilebur ini, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga memastikan tidak ada PHK alias Pemutusan Hubungan Kerja.

Ia menegaskan, penggabungan perusahaan negara ditujukan untuk penguatan dan menghindari adanya tumpang tindih. "Langkah ini merupakan bagian dari *streamline* antar BUMN. Walau tidak semua BUMN yang ada kemiripan akan dilebur juga ya," ujar Arya kepada wartawan, Selasa (21/9).

Menurut Arya, kondisi internal dan iklim bisnis dinilai menjadi faktor pendorong Kementerian BUMN menggabungkan beberapa perusahaannya menjadi satu entitas. Peleburan perlu dilakukan, agar sinergi antar perusahaan semakin kuat. ■ DWI

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Fokus Kembangkan Penghiliran CPO

Moratorium pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit yang termaklud dalam Instruksi Presiden No.8/2018 telah efektif berakhir per 19 September 2021. Hingga kini, pemerintah belum memberi kepastian untuk sepenuhnya mengakhiri atau justru memperpanjang masa berlaku moratorium.

Ketidakpastian tersebut memicu reaksi di pasar internasional. Harga minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) melemah sepanjang pekan lalu, atau menjelang berakhirnya moratorium pembukaan lahan sawit di Indonesia. Padahal, sepekan sebelumnya, reli harga CPO masih bergulir.

Puncaknya, pada penutupan perdagangan Jumat (19/9), harga kontrak berjangka CPO untuk pengiriman Oktober 2021 di Bursa Malaysia Derivatives (Malaysia Derivatives Exchange) anjlok 3,9% ke level 4.518 ringgit Malaysia per ton.

Jika ketidakpastian perpan-

jangkan moratorium dibiarkan, risiko terhadap perekonomian sangat mungkin terbuka. Khawatirnya, pasar internasional akan menangkap sinyal pasokan tambahan dari Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Sinyal itu berpeluang menciptakan sentimen negatif atas harga CPO yang telah melonjak lebih dari 50% dalam setahun terakhir. Padahal, kenaikan harga CPO telah menopang neraca perdagangan dan penguatan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Oleh karena itu, kebijakan perpanjangan moratorium akan menjadi langkah yang sangat strategis. Perpanjangan moratorium di Indonesia berpeluang memicu kenaikan harga lebih lanjut karena pasokan dunia bakal cenderung stagnan sementara permintaan dunia terus membaik mengikuti pembukaan kembali ekonomi di negara maju.

Badan Pusat Statistik mencatat, sepanjang Januari—Agustus tahun ini, ekspor minyak nabati

mencapai US\$20,64 miliar atau naik 70,14% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, minyak sawit masih menjadi kontributor terbesar terhadap ekspor nonmigas nasional dengan kontribusi sebesar 15,39%.

Dengan semangat penundaan ekspansi perkebunan, kita berharap korporasi dan produsen kelapa sawit dapat fokus meningkatkan produktivitas melalui program peremajaan kebun.

Di samping itu, pelaku industri juga harus terus mendorong penghiliran produk sawit guna mendorong nilai tambah serta menangkap peluang di pasar global.

Kita harus menyadari bahwa perkembangan penghiliran industri sawit saat ini tumbuh stagnan. Sejatinya, kita memang telah mengubah CPO menjadi *refined, bleached, and deodorized palm oil (RBDPO)* atau oleopangan. Akan tetapi, oleopangan saja tidak cukup.

Berdasarkan data dari

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 23/9/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Kementerian Perdagangan, ekspor produk minyak sawit memang telah didominasi oleh produk hilir. Produk oleopangan bahkan menyumbang sekitar 67% dari total ekspor.

Namun, permintaan pasar terhadap bahan baku biohidrokarbon, pelumas, dan *emulsifier* akan mempercepat pergeseran hilirisasi. Pengubahan CPO menjadi *green diesel* dan pelumas jauh lebih menarik ketimbang produk tradisional seperti oleopangan.

Kami memperkirakan, nilai tambah dari CPO menjadi oleopangan hanya berkisar US\$18/ton. Sementara itu, pengubahan CPO menjadi FAME maupun *green diesel* memiliki nilai tambah sekitar US\$150/ton, sedangkan pengubahan menjadi bahan baku pelumas mencapai US\$200/ton.

Artinya, kita sudah harus sibuk menyiapkan teknologi bernilai tambah untuk CPO sebagai komoditas andalan. Untuk itu, penyesuaian sistem fiskal dan perbaikan sistem logistik mutlak dibutuhkan. ■ 812